

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi merupakan salah satu isu sentral dan global pada paruh kedua abad ke-20. Berbagai macam gerakan dan upaya mewujudkan kehidupan demokratis tumbuh dan berkembang di mana-mana, terutama di negara-negara dunia ketiga, termasuk Indonesia. Sejak perjuangan mewujudkan kemerdekaan bangsa Indonesia telah mencita-citakan negara yang berkedaulatan rakyat (demokrasi) dengan tujuan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Amin Rais mengatakan, pada era pasca 1998, setidaknya ada lima persoalan besar yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia, yakni demokratisasi, pembentukan pemerintahan yang paling bersih, penegakan keadilan sosial, pembangunan sumber daya manusia, dan penguatan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pada awal abad XXI, lima masalah tersebut akan menjadi tantangan besar yang harus dihadapi oleh kepemimpinan nasional pasca 1998 (Daman, 2001: 97).

Selama pemerintahan Orde Baru, demokrasi pancasila yang dikemas serta dikembangkan untuk memperbaiki demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin, ternyata dalam pelaksanaannya masih banyak mengandung elemen-elemen nondemokratik, sehingga melahirkan pemerintahan yang sementara oleh pengamat disebut sebagai otoriter birokratik. Berbagai peristiwa dan gerakan perlawanan rakyat selama rezim Soeharto, terutama pada dekade

1990-an dan menjelang pemilu 1997, menunjukkan meningkatnya jeritan tuntutan kebutuhan hidup demokratis dalam tatanan masyarakat Indonesia, di samping masalah krisis ekonomi, tidak berperannya lembaga legislatif dan mandulnya organisasi politik, pemilihan umum yang menghasilkan perwakilan semu serta tidak bisa menyalurkan kehendak dan aspirasi rakyat, menyebabkan komunikasi rakyat tersumbat.

Isu politik lain yang cukup berarti dalam *Nahdah al-'Ulamā'* (NU) di era reformasi adalah dideklarasikannya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) oleh pengurus besar NU. Setelah melalui jalan berliku-liku, tatkala situasi euforia politik di era reformasi terbuka pintu kebebasan, NU kembali memprakasai pembentukan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang diklaim sebagai partai penyalur aspirasi politik warga NU, sehingga secara *defacto*, NU kembali bermain politik praktis. Bagi NU, pendirian partai merupakan keharusan bagi sejarah perpolitikan warga NU dalam konstelasi politik reformasi Indonesia. Sekalipun, langkah tersebut dianggap kontroversial dan terkesan ambiguitas. Karena, di satu sisi menetapkan norma Khittah 1926 sebagai barometer untuk memutuskan hubungan keorganisasian terhadap semua partai politik. Di sisi lain, Pengurus Besar NU merekomendasikan dengan hanya mengakui keabsahan kepada satu partai, yakni PKB. Di samping itu, sebagaimana dalam setiap kasus politik, NU tetap mempertimbangkan normatif fiqīh. Bagi NU adalah suatu kewajiban untuk *beramar ma'rūf nahī munkar*. Untuk membangun pemerintah yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) haruslah dilakukan secara

komprehensif. Strategi perjuangan dengan melepaskan diri dari gelanggang politik praktis pada masa Orde Baru agaknya perlu dirubah. Di sini perjuangan melalui parlemen, dengan kendaraan politiknya menjadi suatu keharusan. Dengan demikian, pendirian Partai Kebangkitan Bangsa bagi NU sebagai alat untuk menjalankan *amar ma'rūf nahī munkar* menjadi wajib (Hamdani Mu'in, 2001: 93).

Sebagai ormas keagamaan terbesar yang bergerak dalam bidang dakwah, pendidikan dan ekonomi, keterlibatan NU dalam wacana maupun gerakan reformasi menjadi suatu keniscayaan. Salah satu wacana yang dikembangkan oleh NU ketika reformasi bergulir di antaranya adalah penegakan demokrasi dan keabsahan presiden wanita di mata syari'at yang terlihat dari hasil Munas Alim Ulama NU di Lombok pada tanggal 17 Nopember. NU mempunyai pemikiran yang cukup relevan terhadap penegakan demokrasi di Indonesia, yaitu bagi NU pengembangan demokrasi membutuhkan basis sosial yang kuat, karena itu penguatan terhadap civil society (masyarakat sipil), dalam arti bebas, mandiri dan bertanggung jawab. Masyarakat sipil dirumuskan oleh NU sebagai masyarakat etis yang menjunjung kesetaraan, menghargai kebebasan, terdapat saling kepercayaan, kesukarelaan, persaudaraan, keswadayaan dan kemandirian, terutama dalam berhadapan dengan negara dan kekuatan kapital (Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mu'tamar, Munas, dan Konbes NU Tahun 1926-2004, 2007: 662-663).

Prinsip-prinsip tersebut merupakan habitat yang sangat penting bagi tumbuhnya mentalitas dan tatanan politik yang demokratis. Walaupun demikian, konsep masyarakat sipil bukanlah konsep yang utopis, sebab hakikat masyarakat sipil telah ada di Indonesia.

Mu'tamar XXX NU yang berlangsung di Lirboyo, Kediri, Jawa Timur telah banyak menghasilkan keputusan penting bagi masa depan NU. Kebijakan-kebijakan organisasi dan rekomendasi yang dirumuskan dalam Mu'tamar tersebut mengisyaratkan bahwa NU senantiasa memiliki komitmen terhadap keutuhan bangsa dan negara. Hal ini menunjukkan bahwa NU memberikan perhatian yang serius terhadap tatanan kehidupan masyarakat yang makmur, berkeadilan dan sejahtera dan menolak segala bentuk upaya disintegrasi dan propaganda yang berakibat hancurnya sistem sosial. NU bukan saja peduli terhadap kepentingan sendiri tetapi lebih dari itu, bahwa keutuhan bangsa dan negara merupakan keniscayaan dan harus diutamakan karena merupakan prasyarat terwujudnya demokrasi dan kemakmuran (Materi Pertanggungjawaban Pengurus Besar NU: Mu'tamar NU ke-31, 2004:1).

Tahun 1999 adalah masa yang paling menarik untuk dikaji. Di satu sisi, karena masa itu merupakan masa transisi dengan ditandai beralihnya masa demokrasi terpimpin menuju masa reformasi. Di sisi lain, masa reformasi dan terpilihnya K.H. Abdurrahman Wahid, merupakan dua momen penting bagi NU. Seiring terpilihnya K.H. Abdurrahman Wahid pada tanggal 20 Oktober 1999 menjadi presiden, maka dengan sendirinya kran-kran demokrasi sedikit demi sedikit mulai terbuka lebar. Terpilihnya K.H.

Abdurrahman Wahid menjadi presiden, menempatkan NU pada posisi dilematis antara mendukung Abdurrahman Wahid yang sebelumnya menjadi referensi NU sebagai presiden, tanpa bersikap kritis sama sekali terhadap kebijakan pemerintah atau tetap memperjuangkan terciptanya tatanan masyarakat yang berkeadilan dan demokratis. Berbeda keadaan, ketika NU berada di luar kekuasaan pada masa rezim Soeharto, NU atau orang-orang NU selalu mengkritisi dan mengontrol terhadap bentuk kebijakan pemerintah yang tidak memihak kepada kepentingan rakyat yang berakibat tersumbatnya proses demokrasi di Indonesia (Feillard, 1999: 105-119).

NU sebagai ormas keagamaan merasa mempunyai andil besar dalam mengawal dan mewujudkan demokrasi di Indonesia. Maka, melalui forum *Bahsu al-Masāil al-Dīniyyah al-Maudū'iyah Mu'tamar XXX* NU di PP. Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, tahun 1999, yang menghasilkan beberapa keputusan yang berkaitan dengan masalah kehidupan bernegara, misalnya, demokrasi. NU mengambil sebuah keputusan bahwa demokrasi merupakan tatanan yang mengatur hubungan antara negara dan rakyat yang didasarkan atas nilai-nilai universal, yaitu persamaan, kebebasan dan pluralisme. Dilihat dari prinsip bahwa hubungan antara negara dan rakyat didasarkan atas kontrak sosial dengan rakyat yang berhak membentuk pemerintahan, maka, sebenarnya demokrasi sejalan dengan ajaran Islam yang memandang pemerintah sebagai amanah dan penegak keadilan.

Bahsu al-Masāil al-Dīniyyah adalah salah satu forum diskusi keagamaan dalam organisasi NU untuk merespons dan memberikan solusi atas

problematika yang muncul bagi kehidupan masyarakat. Melalui forum ini dihasilkan sebuah keputusan dari kesepakatan hukum yang dipercayai menjadi tradisi dan pembimbing kehidupan bagi masyarakat umum khususnya warga NU. Keputusan hasil *Bahsu al-Masail* adalah sebuah wacana yang perlu dianalisis untuk mengungkap bagaimana isi teks tersebut, bagaimana dan mengapa pesan itu disampaikan.

Berangkat dari asumsi di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang NU dan demokrasi di Indonesia yang difokuskan dengan cara melakukan analisis wacana kritis terhadap keputusan *Bahsu al-Masail al-Diniyyah al-Maudu'iyah Mu'tamar XXX NU di PP. Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, tahun 1999*. Penelitian ini, difokuskan pada masalah-masalah *maudu'iyah*nya saja. Penulis tertarik melakukan penelitian ini dengan alasan: Pertama, karena NU sebagai organisasi kemasyarakatan keagamaan terbesar di Indonesia yang secara organisatoris tidak terikat oleh partai politik manapun, namun memberikan kebebasan dan menghargai warganya yang menggunakan hak politiknya secara bertanggung jawab dalam menyalurkan aspirasi politiknya. Hal ini berarti NU ikut andil dalam mewujudkan demokrasi di Indonesia. Kedua, hasil keputusan *Bahsu al-Masail al-Diniyyah al-Maudu'iyah Mu'tamar XXX NU di PP. Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, tahun 1999*, sangat layak untuk dianalisis wacana kritis karena merupakan sikap NU yang bersifat representatif guna merespons masalah yang berkaitan dengan kehidupan bernegara, misalnya tentang masalah demokrasi di Indonesia. Dengan demikian, judul dalam tesis ini adalah NU dan Demokrasi di

Indonesia (Studi Analisis Wacana Kritis terhadap Keputusan *Bahsu al-Masāil al-Dīniyyah al-Maudū'iyah Mu'tamar XXX NU* di PP. Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, Tahun 1999).

B. Pokok Permasalahan

Berangkat dari latar belakang di atas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pesan yang terkandung dalam pewacanaan demokrasi hasil keputusan *Bahsu al-Masāil al-Dīniyyah al-Maudū'iyah Mu'tamar XXX NU* di PP. Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, tahun 1999?.
2. Dalam konteks apa NU mewujudkan wacana tersebut?.
3. Bagaimana wacana demokrasi sampai kepada masyarakat atau dikonsumsi oleh masyarakat?.

C. Tujuan Penelitian

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui bagaimana pesan yang terkandung dalam pewacanaan demokrasi hasil keputusan *bahsu al-Masāil al-Dīniyyah al-Maudū'iyah Mu'tamar XXX NU* di PP. Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, tahun 1999.
2. Mengetahui dalam konteks apa NU mewujudkan wacana demokrasi di Indonesia.
3. Mengetahui bagaimana wacana demokrasi sampai kepada masyarakat atau dikonsumsi oleh masyarakat.

D. Signifikansi Penelitian

- 1 *Bahsu al-Masail* mempunyai peranan yang penting di dalam merespons dan memberikan solusi atas problematika aktual yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Kesepakatan hukum yang dihasilkan melalui *Bahsu al-Masail* dipercaya menjadi tradisi dan pembimbing kehidupan bermasyarakat, bahkan mampu menjadi pendorong bagi kehidupan bermasyarakat. Hal ini karena penyebaran informasi hasil keputusan *Bahsu al-Masail* sudah dilakukan secara luas sekaligus dapat dipahami dengan mudah. Oleh karena itu, perlu sekali hasil keputusan *Bahsu al-Masail* dianalisis wacana kritis supaya terungkap bagaimana pesan yang disampaikan dalam keputusan tersebut.
- 2 Di antara nilai penting dalam penelitian ini adalah menambah kajian tentang NU dan demokrasi di Indonesia melalui analisis wacana kritis terhadap hasil keputusan *Bahsu al-Masail*, di mana selama ini kebanyakan literatur lebih menitikberatkan pada metode *Bahsu al-Masailnya* saja. Sehingga dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan teori dalam bidang analisis wacana kritis, khususnya analisis wacana kritis terhadap hasil keputusan *Bahsu al-Masail al-Diniyyah al-Maudu'iyah Mu'tamar XXX NU di PP. Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, tahun 1999*.
- 3 Meningkatkan daya kritis masyarakat dalam menganalisis wacana kritis hasil keputusan yang disampaikan dan dikembangkan oleh organisasi

kemasyarakatan, partai politik, media massa dan lain sebagainya untuk dikonsumsi..

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelitian penulis, belum ada penelitian yang memfokuskan pada kajian analisis wacana kritis terhadap hasil keputusan *Bahsu al-Masail al-Diniyyah al-Maudu'iyah Mu'tamar XXX NU* di PP. Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, tahun 1999. Tetapi, banyak penelitian dan karya ilmiah yang membahas tentang NU dengan kecenderungan mengambil tema-tema politik, paham keagamaan, maupun tokohnya, serta metode *istinbat* hukum dalam *Lajnah Bahsu al-Masail*. Penelitian ilmiah yang membahas tentang *Lajnah Bahsu al-Masail*, pada akhir tahun 1996, yakni skripsi Slamet Basyir, "*Majlis Bahsu al-Masail Syuriyyah NU: Studi tentang Pola Pengkajian dan Penetapan Hukum Islam*" (IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1991). Secara garis besar skripsi ini menyatakan majlis *Bahsu al-Masail* dalam memahami ajaran Islam berdasarkan empat sumber hukum yang disepakati, yaitu *al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas*. Di samping mengakui adanya sumber-sumber hukum lain yang diperselisihkan, NU menganut paham *taqlid* bermazhab yang dianggap merupakan jalan yang terbaik. Dalam menghadapi tantangan modernitas majlis *Bahsu al-Masail* NU berusaha mengembangkan sistem bermazhab secara *manhaji*.

Radino, dalam penelitian tesisnya, "*Metode Ijtihad NU, Kajian terhadap Keputusan Bahsu al-Masail NU Pusat pada Masalah-Masalah Fiqih Kontemporer*", (Tesis MA, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 1997). Tesis ini,

membahas enam masalah fiqh kontemporer yang diambil dari keputusan *Lajnah Bahsu al-Masāil* dalam Munas Alim Ulama 1992 di Bandar Lampung dan *Mu'tamar XXIX* tahun 1994 di Tasikmalaya. Kesimpulan yang dikemukakan Radino adalah NU lebih banyak menggunakan metode *ijtihād ta'līlī* atau didasarkan pada *illah* dan *istislahī* atau bertumpu pada asas kemaslahatan, serta sedikit sekali mengembalikan kepada kitab-kitab *fiqh* klasik.

Imam Yahya, " *Bahsu al-Masāil* NU dan Transformasi Sosial: Telaah Istinbat Hukum Pasca Munas Bandar Lampung 1992", (Tesis MA, IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1998). Tesis ini membahas tentang hasil keputusan *Lajnah Bahsu al-Masāil* dalam *Munas Alim Ulama* tahun 1992 di Bandar Lampung, *Mu'tamar XXIX* tahun 1994 di Tasikmalaya dan *Munas Ālim Ulamā'* tahun 1997 di Nusa Tenggara Barat. Menurut Imam Yahya, metode penetapan hukum yang dipergunakan oleh NU secara berurutan adalah bermazhab secara *qaulī* (mengutip langsung dari naskah kitab rujukan), *manhajī* (menelusuri dan mengikuti metode *istinbat* hukum mazhab empat), *ilhāq* (menganalogikan hukum permasalahan tertentu yang belum ada dasar hukumnya dengan kasus serupa yang belum ada dalam suatu kitab rujukan) dan *istinbat jama'i* (penggalan dan penetapan hukum secara kolektif).

Hamdani Mu'in, penelitian tesisnya, "Tradisi *Fiqh* dalam Wacana Politik NU Era Reformasi (Tahun 1998-1999)". Hamdani melakukan penelitian terhadap tradisi *fiqh* politik yang berlaku di kalangan NU. Karena, melalui proses akulturasi antara nilai-nilai keagamaan di satu sisi, dan

kesediaannya berdialog dan bersikap toleran dengan tradisi dan budaya yang berkembang di masyarakat di sisi lain menyebabkan watak NU bukan hanya sebuah organisasi formal, melainkan sebagai gerakan kultur yang berakar di tengah masyarakat yang tidak terlepas dari paradigma *fiqih*. Untuk memfokuskan penelitiannya dan karena banyaknya problem politis NU, maka Hamdani Mu'in membatasi pada perjalanan politik NU pada era reformasi tahun 1998-1999. Secara garis besar tesis ini menyimpulkan bahwa sikap perilaku politik NU merupakan pengejawantahan dari tradisi *fiqih*nya. Dalam kaidah *fiqih* disebutkan bahwa ketika menghadapi dua pilihan yang dilematis, maka, harus diprioritaskan pilihan yang paling kecil dampak negatifnya. Bagi NU, yang terpenting tujuan baik itu dapat dicapai tanpa melahirkan kemadaratan baru.

Penelitian penulis berupaya untuk menggali NU dan demokrasi di Indonesia yang didasarkan atas analisis wacana terhadap hasil keputusan *Bahsu al-Masail al-Diniyyah al-Maudu'iyah Mu'tamar XXX NU di PP. Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, tahun 1999*. Sedangkan kesimpulan penelitian yang dilakukan sebelum penulis yang telah disebutkan di atas kecuali penelitiannya Hamdani Mu'in, yaitu meneliti tentang metode apa yang digunakan untuk *istinbat* hukum dalam *Bahsu al-Masail*. Adapun Hamdani meneliti tentang tradisi *fiqih*-politik yang berlaku dikalangan NU dengan membatasi pada perjalanan politik NU pada era reformasi tahun 1998-1999. Hal inilah yang membedakan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Diharapkan dalam penelitian ini dapat diketahui bagaimana pesan yang

terkandung dalam hasil keputusan tersebut setelah penulis melakukan analisis wacana kritis.

F. Kerangka Teori

Bahsu al-Masāil al-Dīniyyah adalah salah satu forum diskusi keagamaan dalam organisasi NU untuk merespons dan memberikan solusi atas problematika yang muncul bagi kehidupan masyarakat. *Bahsu al-Masāil* dalam *Mu'tamar* adalah salah satu forum tertinggi NU yang mempunyai otoritas tertinggi untuk merumuskan berbagai masalah keagamaan, baik *Masāil al-Dīniyyah Waqī'iyah* maupun *Maudū'iyah*. Oleh karena itu, melalui forum ini dihasilkan sebuah keputusan dari kesepakatan hukum yang dipercayai menjadi tradisi dan pembimbing kehidupan bagi masyarakat umum khususnya warga NU.

Bahsu al-Masāil al-Dīniyyah al-Maudū'iyah Mu'tamar XXX NU di PP. Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, tahun 1999 menghasilkan beberapa keputusan, di antaranya tentang respon Islam terhadap demokrasi. Wacana itu tidak hanya terbatas pada sesuatu yang tertulis saja. Namun, pidato, percakapan, pembicaraan di muka umum serta upaya-upaya formal seperti laporan ilmiah dan sandiwara juga merupakan wacana. Maka hasil keputusan *Bahsu al-masāil* tersebut adalah sebuah wacana yang perlu dianalisis untuk mengungkap bagaimana isi teks tersebut, bagaimana dan mengapa pesan itu disampaikan.

Analisis wacana kritis, menggunakan bahasa dalam teks untuk dianalisis. Bahasa dianalisis tidak hanya menggambarkan dari aspek

kebahasaan semata, namun juga menghubungkan dengan konteks. Arti konteks di sini adalah bahasa itu dipakai untuk tujuan dan praktek tertentu, termasuk praktek kekuasaan. (Eriyanto, 2001: 7). Menurut Munawar (2007: 120), Pendekatan analisis wacana kritis merupakan pendekatan interdisipliner terhadap teks, yang memandang teks adalah bentuk dari gejala sosial.

Analisis wacana kritis mempunyai lima karakter yang harus diperhatikan, yaitu: Pertama, tindakan. Artinya, wacana dipahami sebagai bentuk interaksi. Kedua, konteks. Artinya, analisis wacana mempertimbangkan konteks dari wacana, seperti latar, situasi, peristiwa, dan kondisi. Wacana dipandang diproduksi, dimengerti, dan dianalisis pada suatu konteks tertentu. Ketiga, historis. Artinya, menempatkan wacana dalam konteks tertentu, berarti wacana diproduksi dalam konteks tertentu dan tidak dapat dimengerti tanpa menyertakan konteks yang menyertainya. Salah satu aspek penting agar bisa mengerti teks adalah dengan menempatkan wacana itu dalam konteks historis tertentu. Keempat, kekuasaan. Artinya, setiap sesuatu yang muncul dalam bentuk teks atau apa pun tidak dipandang sesuatu yang alamiah, wajar dan netral tetapi merupakan bentuk pertarungan kekuasaan. Kelima, ideologi. Artinya, teks, percakapan dan lain sebagainya adalah bentuk dari praktek ideologi atau pencerminan dari ideologi tertentu (Eriyanto, 2001: 8-14).

Banyak pendekatan yang digunakan dalam analisis wacana kritis, namun yang menjadi kerangka (pijakan) penelitian ini adalah pendekatan kognisi sosial dengan tokoh utamanya *van Dijk*. Pendekatan ini menganggap

faktor kognisi merupakan elemen penting dalam produksi wacana. Wacana dilihat bukan hanya dari struktur wacana, tetapi juga menyertakan wacana itu diproduksi. proses produksi itu disebut sebagai kognisi sosial.

G. Metode Penelitian

1. Penelitian ini bersifat kualitatif. Obyek penelitian ini difokuskan pada kajian analisis wacana kritis terhadap hasil keputusan *Bahsu al-Masail al-Diniyyah al-Maudu'iyah Mu'tamar XXX NU di PP. Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, tahun 1999.*

2. Sumber Data

Data penelitian ini bersumber dari:

- a. Data Primer. Data ini merupakan sumber utama, yaitu berupa buku tentang solusi problematika aktual hukum Islam, keputusan *Mu'tamar, Munas dan Konbes NU tahun 1926-2004*, yang diterbitkan oleh *Lajnah Ta'lif Wan- Nasyr (LTN) NU* bekerja sama dengan Khalista Surabaya. Isi buku ini di antaranya memuat hasil keputusan *Bahsu al-Masail al-Diniyyah al-Maudu'iyah Mu'tamar XXX NU di PP. Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, tahun 1999.*
- b. Data Sekunder. Data ini merupakan sumber sekunder. Data sekunder yang dimaksud di sini adalah berbagai bahan yang tidak berkaitan secara langsung dengan obyek penelitian. Namun, data tersebut diharapkan dapat melengkapi dan memperjelas data primer di atas. Data ini berupa buku, jurnal, dan makalah yang terkait dengan judul penelitian dalam tesis ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Bahan-bahan yang akan dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh dan dikumpulkan melalui teknik sebagai berikut:

- a. Dokumentasi dan Library Research, yakni penelitian melalui dokumen dan atau buku-buku literatur sebagai data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual (Bachtiar, 1997: 43). Studi dokumentasi dilakukan dengan mengadakan penelusuran pada perpustakaan-perpustakaan guna memperoleh data yang menyangkut penelitian di atas. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dilakukan dengan mempelajari secara cermat dan teliti terhadap dokumen-dokumen yang ada.
- b. Wawancara, yakni percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu yang mengajukan pertanyaan (pewawancara) dan yang memberikan jawaban atas pertanyaan (terwawancara). Tujuan diadakannya wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penelitian yang sering kali tidak ditemukan secara tertulis dalam literatur, atau sekalipun ada tidak dilaporkan secara lengkap. Sehingga dalam hal ini diperlukan sandaran informasi dari individu yang secara langsung bersentuhan dengan penelitian di atas. Wawancara ini dilakukan secara terstruktur, yaitu dengan menyusun terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan (Moleong, 2007: 190). Wawancara ini akan digunakan

dalam tanya jawab dengan salah satu anggota atau peserta *Bahsu al-Masail al-Diniyyah al-Maudu'iyah Mu'tamar XXX NU* di PP. Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, tahun 1999.

4. Teknik Analisis Data

Untuk mendapatkan sampai kepada jawaban atas persoalan mendasar dalam penelitian ini, teknik analisis yang menjadi kerangka kerja dilakukan dengan cara menganalisis hasil keputusan *Bahsu al-Masail al-Diniyyah al-Maudu'iyah Mu'tamar XXX NU* di PP. Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, tahun 1999 melalui teknik analisis wacana yang dikembangkan oleh *Teun A. van Dijk*.

Model yang dipakai *van Dijk* ini sering disebut sebagai kognisi sosial (Sobur, 2004: 73). Istilah ini sebenarnya diadopsi dari pendekatan lapangan psikologi sosial. Kognisi sosial di sini terutama untuk menjelaskan struktur dan proses terbentuknya suatu teks (Sobur, 2004: 73). Nama pendekatan semacam ini tidak dapat dilepaskan dari karakteristik pendekatan yang diperkenalkan oleh *van Dijk*. menurut *van Dijk*, penelitian atas wacana tidak cukup hanya didasarkan pada analisis atas teks semata, karena teks hanya hasil dari suatu praktek produksi yang harus juga diamati. Di sini harus dilihat juga bagaimana suatu teks diproduksi, sehingga bisa diperoleh suatu pengetahuan kenapa teks bisa semacam itu (Eriyanto, 2001: 221). Wacana oleh *van Dijk* digambarkan mempunyai tiga dimensi atau bangunan, yaitu teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Inti dari teori analisis *van Dijk* adalah menggabungkan

ketiga dimensi wacana tersebut ke dalam satu kesatuan analisis (Eriyanto, 2001: 224).

Dimensi teks yang akan diteliti adalah struktur dari teks yang dapat dianalisis secara linguistik. Dimensi kognisi sosial untuk menjelaskan bagaimana suatu teks diproduksi oleh individu atau kelompok pembuat teks. Sedangkan konteks melihat bagaimana teks itu dihubungkan lebih jauh dengan struktur sosial dan pengetahuan yang berkembang dalam masyarakat atas suatu wacana. Ketiga dimensi ini harus dilakukan bersama-sama dan bersifat integral (Eriyanto, 2001: 225).

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua akan memaparkan gambaran umum NU dan demokrasi di Indonesia. Bab ini memuat tentang latar belakang kelahiran NU, dinamika politik NU dan demokrasi di Indonesia.

Bab ketiga akan menyajikan hasil keputusan *Bahsu al-Masail al-Diniyyah al-Maudu'iyah Mu'tamar XXX NU di PP. Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, tahun 1999*. Bab ini memuat tentang latar belakang lahirnya keputusan *Bahsu al-Masail al-Diniyyah al-Maudu'iyah Mu'tamar XXX NU di PP. Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, tahun 1999*, dan menyajikan hasil keputusannya.

Bab keempat akan membahas tentang pandangan NU terhadap demokrasi di Indonesia. Bab ini memuat analisis teks hasil keputusan *Bahsu al-Masāil al-Dīniyyah al-Maudū'iyah Mu'tamar XXX* NU di PP. Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, tahun 1999. Bab ini juga memuat kognisi sosial, analisis sosial munculnya hasil keputusan *Bahsu al-Masāil al-Dīniyyah al-Maudū'iyah Mu'tamar XXX* NU di PP. Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, tahun 1999, dan refleksi penulis tentang wacana demokrasi hasil keputusan *Bahsu al-Masāil al-Dīniyyah al-Maudū'iyah Mu'tamar XXX* NU di PP. Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, tahun 1999.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan, daftar pustaka dan lampiran-lampiran.